



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI BENGKULU**

Jl. Adam Malik (D.h. P. Natadirja No. 271) Km. 8 Bengkulu  
Telp. (0736) 345237 – 343082 Fax. (0736) 345311

Nomor : S- 1512/WPB.09/2018  
Sifat : Segera  
Hal : Penyampaian Laporan Kajian Fiskal  
Regional (KFR) Triwulan III TA. 2018

8 November 2018

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan  
c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta

Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, berikut disampaikan Laporan Kajian Fiskal Regional Provinsi Bengkulu Triwulan III TA. 2018. Laporan tersebut dalam bentuk *softcopy* telah kami sampaikan melalui e-mail dengan alamat [lo.ditpa@gmail.com](mailto:lo.ditpa@gmail.com)

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Pih. Kepala Kantor,  
Dana  
NIP. 197305271994031001



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

# KAJIAN FISKAL REGIONAL



Triwulan III  
2018

**Penyusun:**

Penanggung Jawab: Ismed Saputra | Ketua Tim: Abdullah |  
Editor: Arwin Fathurrakhman | Desain Grafis: Eko Siyam B. |  
Anggota: Dagri Meifardo | Hermono | Yunisah | Jumadi |

**KANWIL DITJEN  
PERBENDAHARAAN**  
Provinsi Bengkulu

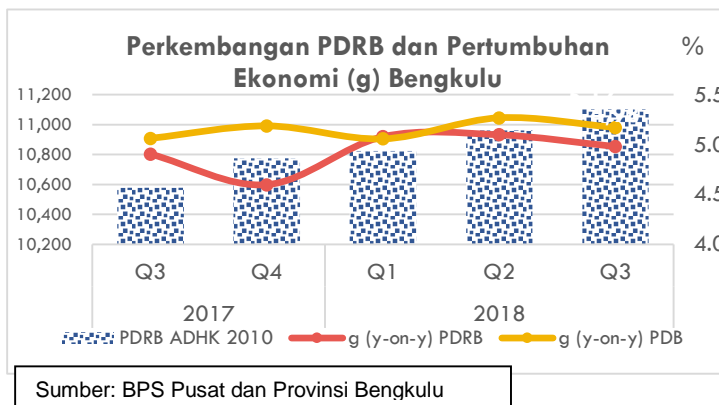
## DAFTAR ISI

|      |  |    |
|------|--|----|
| I.   | PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL.....                                      | 1  |
|      | A. Produk Domestik Regional Bruto.....   | 1  |
|      | B. Inflasi.....  | 2  |
|      | C. Indikator Kesejahteraan.....  | 3  |
| II.  | PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN.....                                      | 6  |
|      | A. Pendapatan Negara.....  | 6  |
|      | B. Belanja Negara.....   | 9  |
|      | C. Prognosis Realisasi APBN.....   | 12 |
| III. | PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD.....                                      | 13 |
|      | A. Pendapatan Daerah.....  | 14 |
|      | B. Belanja Daerah.....   | 17 |
|      | C. Prognosis Realisasi APBD.....   | 18 |
| IV.  | PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN<br>(APBN DAN APBD)..... | 19 |
|      | A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian.....                                    | 19 |
|      | B. Pendapatan Konsolidasian.....   | 19 |
|      | C. Belanja Konsolidasian.....  | 21 |
|      | D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....   | 23 |
| V.   | BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH.....   | 24 |
|      | Peran Dana Desa Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu.....        | 24 |

## I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

### A. Produk Domestik Regional Bruto

Perekonomian Provinsi Bengkulu Triwulan III Tahun 2018 atas dasar harga berlaku mencapai Rp16,79 triliun sedangkan berdasarkan harga konstan 2010 mencapai Rp11,10 triliun. Pertumbuhan ekonomi Bengkulu sebesar 1,32 persen (q-to-q) atau sebesar 4,98 persen (y-on-y). Secara nasional, pertumbuhan Provinsi Bengkulu tercatat lebih rendah dari angka nasional (5,17 persen) namun berada di atas laju rata-rata pertumbuhan regional Sumatera (4,96 persen). Angka pertumbuhan tersebut berada pada peringkat kelima di bawah Provinsi Sumatera Barat dan Lampung.



Struktur perekonomian Provinsi Bengkulu Triwulan III Tahun 2018 dilihat dari segi lapangan usaha, masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yang sama dengan periode sebelumnya yaitu: pertanian,

kehutanan dan perikanan (28,56 persen), perdagangan besar dan eceran (15,00 persen), serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (9,98 persen). Berdasarkan perkembangan triwulanan, seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan dimana pertumbuhan tertinggi ada pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran (8,29 persen) dan jasa lainnya (8,05 persen) seiring dengan peningkatan perdagangan pada masa dimulainya tahun ajaran baru di sekolah, pencairan gaji dan tunjangan kinerja ke-13 dan Hari Raya Idul Adha serta penyediaan akomodasi makan minum (7,92 persen) yang disebabkan efek momen penyelenggaraan kegiatan berskala nasional berupa festival tabot pada awal bulan September 2018 dan kompetisi sains madrasah tingkat nasional yang dipusatkan di Bengkulu pada akhir bulan September 2018.

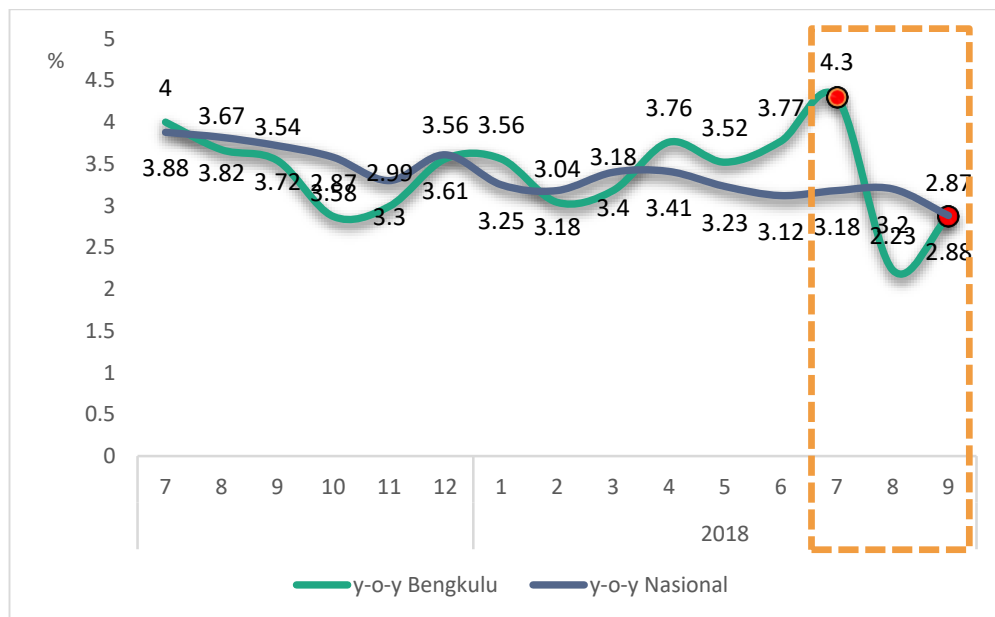
Sedangkan struktur perekonomian Provinsi Bengkulu Triwulan III Tahun 2018 dilihat dari segi pengeluaran menunjukkan semua komponen tumbuh positif. Perekonomian ditopang oleh konsumsi rumah tangga (63,65 persen) diikuti oleh komponen impor (62,77 persen) dan komponen PMTB (40,35 persen). Berdasarkan perkembangan triwulanan, tercatat komponen PMTB merupakan komponen yang mengalami

pertumbuhan tertinggi (4,06 persen) seiring dengan peningkatan investasi pembangunan jasa konstruksi dan infrastruktur di daerah pulau baai. Kemudian diikuti komponen pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 1,94 persen seiring dengan peningkatan realisasi APBN dan APBD, pelaksanaan program kegiatan kementerian/OPD dan pencairan gaji dan tunjangan kinerja ke-13 bagi ASN. Selain itu, komponen impor barang dan jasa juga tumbuh sebesar 1,25 persen atas keperluan impor bahan material proyek konstruksi dari luar negeri.

## B. Inflasi

Inflasi Provinsi Bengkulu yang diwakili oleh Kota Bengkulu sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 (y-o-y) tercatat 2,87 persen. Angka ini masih rendah dari inflasi nasional sebesar 2,88 persen.

Perkembangan Inflasi Provinsi Bengkulu dan Nasional (y-o-y)



Sumber: BPS Pusat dan Provinsi Bengkulu

Inflasi bulanan (m-t-m) pada bulan Juli 2018 tercatat sebesar 0,87 persen. Inflasi ini didorong oleh kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 2,57 persen yang terutama dipicu oleh perubahan harga angkutan udara sebesar 11,07 persen. Selain itu, kelompok pengeluaran harga makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau menyumbang inflasi sebesar 0,50 persen. Sementara pada kelompok pengeluaran kesehatan mengalami deflasi sebesar -0,13 persen.

Inflasi bulanan (m-t-m) pada bulan Agustus 2018 tercatat mengalami deflasi sebesar -1,80. Deflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran transportasi,

komunikasi dan jasa keuangan sebesar -9,20 persen. Sedangkan angka inflasi terjadi terutama pada kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,63 persen.

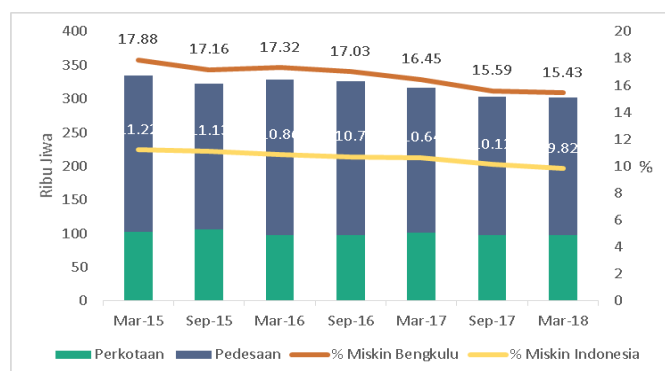
Inflasi bulanan (m-t-m) pada bulan September 2018 tercatat 0,59 persen. Inflasi ini disumbangkan oleh kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 5,60 persen. Kenaikan harga angkutan udara sebesar 32,53 persen menjadi faktor pendorong inflasi pada kelompok ini. Sementara itu, deflasi terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar -2,19 persen.

Inflasi pada triwulan III didorong oleh meredanya ekspektasi konsumsi masyarakat pasca Hari Raya Idul Fitri dan libur sekolah dan didukung oleh kecukupan pasokan serta upaya preventif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam upaya pengendalian inflasi. Beberapa upaya yang dilakukan untuk menekan inflasi di Provinsi Bengkulu adalah dengan mempermudah konektivitas antar wilayah yaitu dengan menambah destinasi langsung moda angkutan udara dari dan menuju Bengkulu misalnya dengan Penambahan rute Lampung, Padang, Batam dan Palembang yang telah direalisasikan dan rencananya akan ditambah ke beberapa kota seperti Bandung dan Yogyakarta dalam waktu dekat sehingga angka inflasi berada pada level terjaga.

### C. Indikator Kesejahteraan

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu menunjukkan adanya tren positif dimana terjadi penurunan persentase penduduk miskin baik di perdesaan maupun di perkotaan. Posisi per Maret 2018 angka kemiskinan sebesar 301,81 ribu jiwa (15,43 persen) atau berkurang 15,17 ribu jiwa dibandingkan periode Maret 2017.

**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bengkulu Tahun 2015 – 2018**



Sumber: BPS Pusat dan Provinsi Bengkulu

Konsentrasi penduduk miskin masih didominasi penduduk di pedesaan. Sejumlah 204,35 ribu jiwa atau 67,71 persen dari total penduduk miskin berada di pedesaan. Lebih lanjut berdasarkan perkembangan garis kemiskinan (kenaikan garis kemiskinan sebesar 6,83 persen dibandingkan periode Maret 2017 menunjukkan bahwa komoditi makanan masih berperan lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan. Komoditi makanan yang memberikan dampak terhadap kemiskinan diantaranya beras, rokok kretek filter, telur ayam ras dan daging ayam ras.

Penurunan persentase penduduk miskin dimaksud perlu dicermati. Secara nasional angka persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu masih berada di atas persentase nasional (9,82 persen). Selanjutnya berdasarkan indikator ketimpangan pendapatan/pengeluaran (gini ratio), terjadi sedikit pengingkatan ketimpangan. Gini ratio pada bulan Maret 2018 mengalami peningkatan menjadi 0,362 atau naik 0,011 dibandingkan periode Maret 2017 (0,351). Sedangkan berdasarkan indeks kemiskinan, terjadi pergeseran tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan dimana indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) di daerah pedesaan lebih tinggi dari perkotaan. Pada Maret 2018, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 2,51 sementara di daerah pedesaan sebesar 2,64. Sementara itu nilai Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan adalah 0,56 sedangkan di daerah pedesaan mencapai sebesar 0,63.

Dalam perkembangan keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu sampai dengan Agustus 2018 menunjukkan bahwa terjadi penurunan pengangguran, peningkatan angkatan kerja dan jumlah penduduk bekerja. Perbandingan statistic ketenagakerjaan dua tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu**

| Jenis Kegiatan Utama                 | Agt 2017 | Agt 2018 |
|--------------------------------------|----------|----------|
| • Angkatan Kerja                     | 969.300  | 998.524  |
| Bekerja                              | 933.000  | 963.463  |
| Penganggur                           | 36.300   | 35.061   |
| • Tingkat Parsitipasi Angkatan Kerja | 69,30%   | 70,06%   |
| • Tingkat Pengangguran Terbuka       | 3,74%    | 3,51%    |

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Keadaan ketenagakerjaan yang tercermin dari komposisi sektoral, status pekerjaan utama dan latar belakang pendidikan menunjukkan keadaan yang kurang menggembirakan. Perekonomian di Provinsi Bengkulu masih ditopang dari sektor pertanian dimana tenaga kerja yang terserap dari sektor ini mencapai 49,27%.

Selanjutnya perekonomian ditopang oleh sektor perdagangan dan sektor industry pengolahan yang masing-masing menyerap tenaga kerja sebesar 15,76% dan 5,46%. Berdasarkan komposisi tersebut, persentase penduduk yang bekerja atau melakukan kegiatan secara informal lebih dominan dibandingkan secara formal. Persentase penduduk yang bekerja di sektor informal mencapai 68,17% dan angka ini meningkat sebesar 1,78% dari angka bulan Agustus 2017. Tingginya persentase pekerja di sektor informal adalah menyebabkan tingkat kesejahteraan pekerja akan menurun. Statistik juga mencatatkan bahwa penyerapan tenaga kerja sebesar 577.780 orang masih didominasi penduduk dengan latar belakang pendidikan rendah dengan komposisi tamat SD (39,50%) dan SMP (20,47%). Selain itu, sebesar 7,11% tamatan Diploma I/II/III berada pada posisi menganggur.



## II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2018, Pendapatan Negara mencapai Rp1.470,76 miliar atau meningkat 8,6 persen dibanding Triwulan III Tahun 2017 yang sebesar Rp1.354,26 miliar. Sementara realisasi Belanja Negara sampai dengan triwulan III 2018 sebesar Rp10.293,52 meningkat 0,69 persen dibanding Triwulan III Tahun 2017 yang sebesar Rp10.222,66 miliar.

### Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Bengkulu s.d. Akhir Triwulan III Tahun 2017 dan Tahun 2018

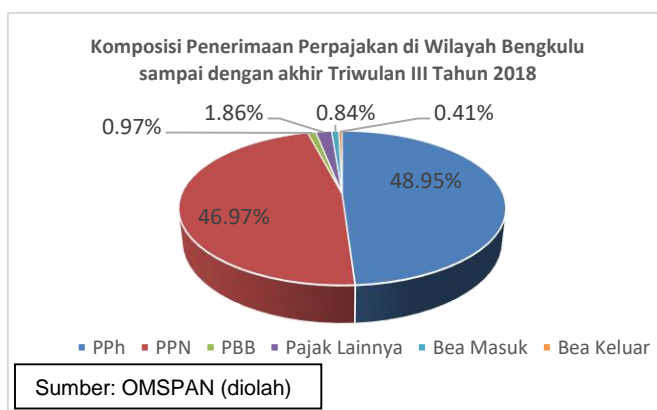
(dalam miliar Rp)

| Uraian                               | Tahun 2017         |                   | Tahun 2018         |                   |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|                                      | Pagu               | Realisasi         | Pagu               | Realisasi         |
| <b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>          | <b>2,237.76</b>    | <b>1,354.26</b>   | <b>2,315.74</b>    | <b>1,470.76</b>   |
| I. PENERIMAAN DALAM NEGERI           | 2,237.76           | 1,354.26          | 2,315.74           | 1,470.76          |
| 1. Penerimaan Pajak                  | 2,000.00           | 1,096.10          | 2,030.00           | 1,183.45          |
| 2. PNPB                              | 237.76             | 258.15            | 285.74             | 287.30            |
| II. HIBAH                            | -                  | -                 | -                  | -                 |
| <b>B. BELANJA NEGARA</b>             | <b>14,815.77</b>   | <b>10,222.66</b>  | <b>14,409.68</b>   | <b>10,293.52</b>  |
| I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT          | 4,202.56           | 2,542.57          | 4,621.42           | 2,797.82          |
| 1. Belanja Pegawai                   | 1,477.62           | 1,062.55          | 1,539.34           | 1,155.53          |
| 2. Belanja Barang                    | 1,451.66           | 819.96            | 1,931.14           | 1,092.06          |
| 3. Belanja Modal                     | 1,259.81           | 654.56            | 1,136.75           | 543.07            |
| 4. Belanja Bantuan Sosial            | 13.47              | 5.49              | 14.20              | 7.16              |
| II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA | 10,613.21          | 7,680.09          | 9,788.26           | 7,495.70          |
| 1. Transfer ke Daerah                | 9,577.87           | 7,003.58          | 8,841.86           | 6,932.43          |
| a. Dana Perimbangan                  | 9,480.85           | 6,906.56          | 8,805.86           | 6,896.43          |
| 1) Dana Alokasi Umum                 | 6,412.87           | 5,357.31          | 6,421.42           | 5,346.69          |
| 2) Dana Bagi Hasil                   | 734.86             | 253.51            | 292.87             | 189.80            |
| 3) Dana Alokasi Khusus               | 2,333.12           | 1,295.74          | 2,091.57           | 1,359.94          |
| b. Dana Insentif Daerah              | 97.02              | 97.02             | 36.00              | 36.00             |
| 2 Dana Desa                          | 1,035.34           | 676.51            | 946.39             | 563.27            |
| <b>C. SURPLUS/DEFISIT</b>            | <b>(12,578.01)</b> | <b>(8,868.40)</b> | <b>(12,093.94)</b> | <b>(8,822.77)</b> |

Sumber: OM SPAN, MEBE dan SIMTRADA (diolah)

### A. Pendapatan Negara

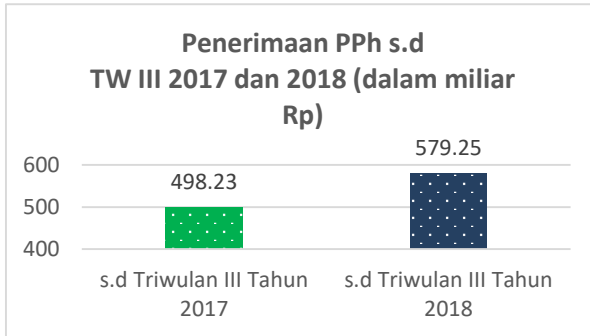
#### 1. Penerimaan Perpajakan



Realisasi penerimaan perpajakan di Bengkulu sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp1.183,45 miliar atau naik Rp87,35 miliar apabila dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2017 yang sebesar Rp1.096,10 miliar. Penerimaan PPh dan penerimaan PPN masih

memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan perpajakan yang sebesar 95,92% dari seluruh penerimaan perpajakan.

a) Pajak Penghasilan (PPh)

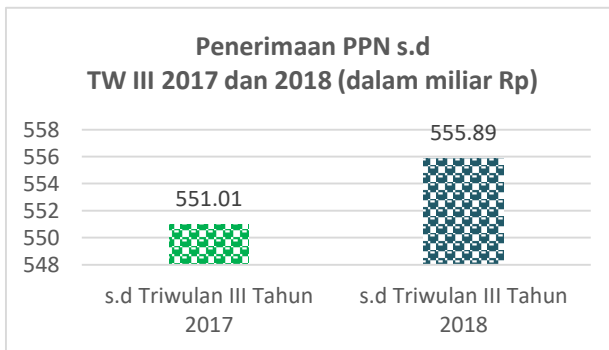


Sumber: OMSPAN (diolah)

Realisasi penerimaan PPh secara kumulatif sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp579,25 miliar atau meningkat 16,26% apabila dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2017. Pertumbuhan penerimaan PPh didominasi oleh penerimaan PPh Pasal

21, PPh Final dan PPh pasal 25/29 Badan. Faktor peningkatan realisasi PPh adalah dari realisasi pencairan gaji ke 13 dan THR pada bulan Juli yang berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak PPh Pasal 21 pada Triwulan III Tahun 2018.

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

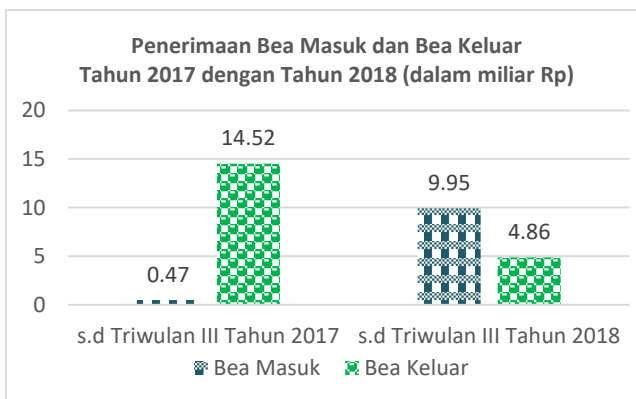


Sumber: OMSPAN (diolah)

Realisasi penerimaan PPh secara kumulatif sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp555,89 miliar mengalami kenaikan 0,89 persen dibanding Triwulan III Tahun 2017. Penerimaan PPN dan PPnBM terus naik didorong

pertumbuhan konsumsi dalam negeri dan kinerja impor.

c) Pajak Perdagangan Internasional



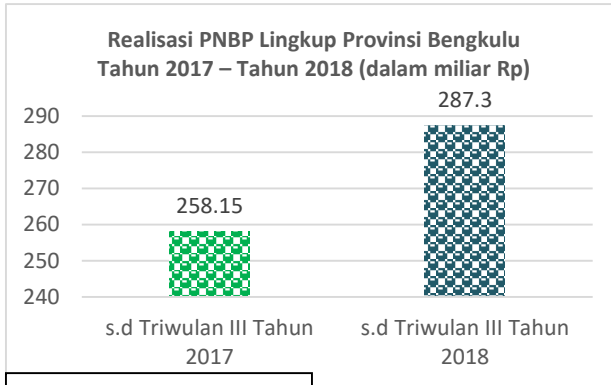
Sumber: OMSPAN (diolah)

Penerimaan Bea Masuk sampai akhir Triwulan III Tahun 2018 mencapai Rp9,95 miliar, lebih besar dari Triwulan III tahun sebelumnya yang mencapai Rp470 juta. Import tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2018 terhadap peralatan konstruksi yang didatangkan dari Tiongkok.

Sedangkan penerimaan Bea Keluar yang pada akhir Triwulan III Tahun 2017 mencapai Rp14,52 miliar, mengalami

penurunan pada akhir Triwulan III Tahun 2018 menjadi sebesar Rp4,86 miliar. Ekspor provinsi Bengkulu terbanyak pada produk batu bara dengan tujuan Negara Philipina dan India.

## 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

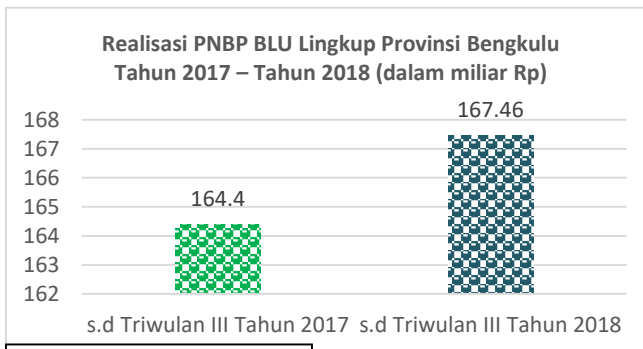


Sumber: OMSPAN (diolah)

Realisasi PNBP di Bengkulu sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp287,30 miliar meningkat Apabila dibandingkan dengan periode akhir Triwulan III Tahun 2017, dimana realisasi PNBP sebesar Rp258,15 miliar, maka terjadi peningkatan sebesar Rp29,15 miliar. Sumbangan terbesar diberikan oleh PNBP BLU

yang mencapai Rp. 167,46 miliar, sedangkan PNBP lainnya sekitar Rp. 119,84 miliar.

### a) Penerimaan PNBP Badan Layanan Umum

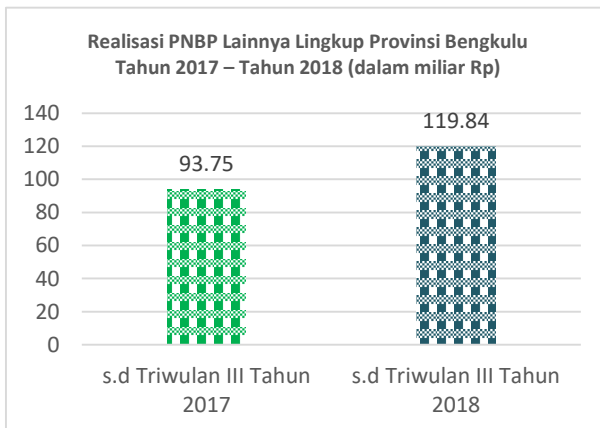


Sumber: OMSPAN (diolah)

Penerimaan PNBP BLU yang pada akhir Triwulan III tahun 2018 mencapai Rp167,46 miliar meningkat 1,86 persen dari triwulan III 2017 yang sebesar Rp164,4 miliar. Penerimaan ini berasal dari PPK BLU di wilayah

Bengkulu ada 4 satker, yaitu Bandar Udara Fatmawati, Universitas Bengkulu, Politeknik Kesehatan Bengkulu dan RS Bhayangkara Bengkulu.

### b) Penerimaan PNBP Lainnya



Sumber: OMSPAN (diolah)

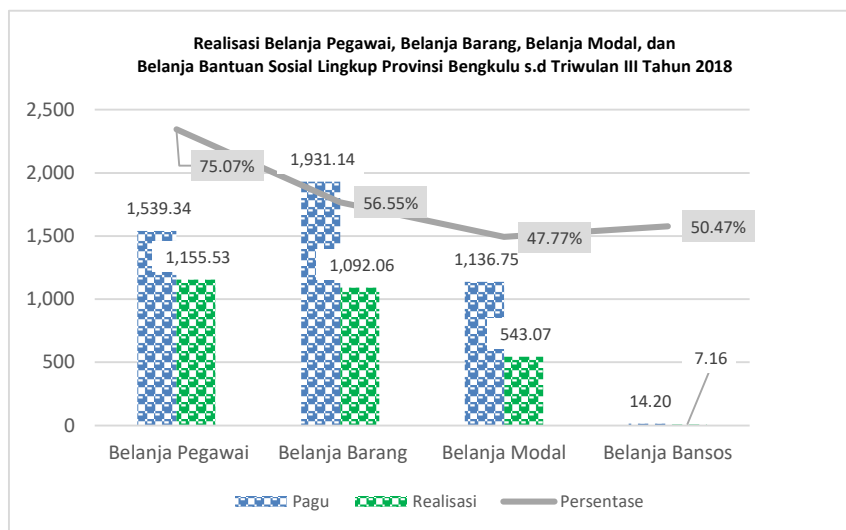
Penerimaan PNBP Lainnya sampai akhir Triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp119,84 miliar atau meningkat 27,82 persen apabila dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2017 yang mencapai Rp93,75 miliar. Meningkatnya penerimaan PNBP Lainnya terutama disumbangkan dari

pendapatan dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan.

## B. Belanja Negara

Belanja Negara sampai dengan triwulan III 2018 sebesar Rp10.293,52 miliar, meningkat 0,69 persen dibanding dengan triwulan III 2017 sebesar Rp10.222,66 miliar. Meningkatnya belanja negara ini disumbang oleh Belanja Pemerintah Pusat yang meningkat 10,04 persen dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengalami penurunan 2,4 persen.

### 1. Belanja Pemerintah Pusat



Realisasi Belanja Pegawai memiliki tingkat penyerapan terbesar yaitu 75 persen. Sedangkan realisasi Belanja Barang sebesar 46,55 persen, Belanja Modal sebesar 47,77 persen dan Belanja

Bantuan Sosial telah sebesar 50,47 persen.

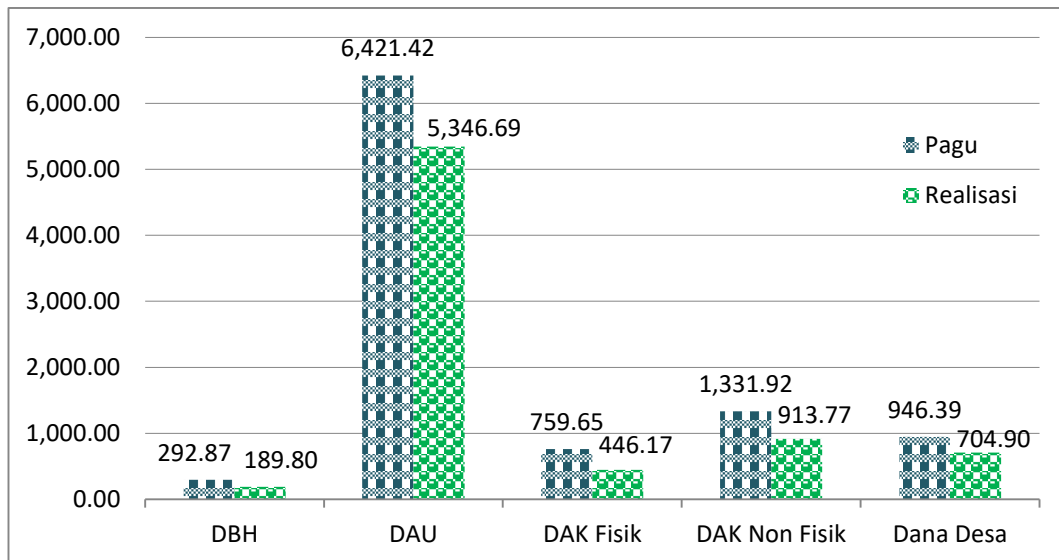
Realisasi Belanja Pegawai relatif stabil dalam hal penyerapan karena sifat belanja pegawai yang rutin pencairannya dalam tiap bulan. Selain pola pembayaran Belanja Pegawai yang bersifat rutin tiap bulan, penyerapan Belanja Pegawai juga dipicu dengan adanya pembayaran gaji ke-13 pada bulan Juli 2018. Sedangkan untuk Belanja Barang, pada Bantuan Pemerintah masih ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan sehingga belum semua SPJ disampaikan. Sedangkan realisasi Belanja Modal, masih pada tahap penyelesaian pekerjaan. Adapun potensi masalah pada Belanja Modal adalah keterlambatan pendaftaran data kontrak dan penyelesaian tagihan, penumpukan tagihan/SPM pada akhir tahun anggaran dan keterlambatan pengajuan SPM-LS ke KPPN pada akhir jadwal pembayaran.

### 2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Pada tahun 2018 Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dialokasikan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu sebesar Rp9,75 triliun

yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Rincian realisasi sebagaimana grafik berikut.

**Realisasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa  
Lingkup Provinsi Bengkulu sampai dengan Akhir Triwulan III Tahun 2018**



Sumber: Simtrada dan OMSPAN (diolah)

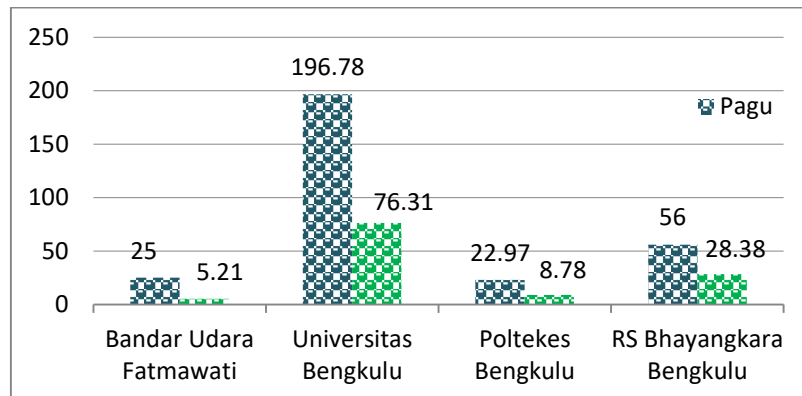
Sampai dengan akhir Triwulan III tahun 2018, realisasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp7,60 triliun atau mencapai 77,94 persen dari pagu TKDD. Rincian realisasi adalah DAU sebesar Rp5,35 triliun, DBH sebesar Rp189,80 miliar, DAK Fisik terealisasi sebesar Rp446,17 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp913,77 miliar dan Dana Desa sebesar Rp704,90 miliar.

Penyaluran dana transfer khususnya DAK Fisik sampai dengan Triwulan III 2018 belum optimal. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan/kegagalan dalam proses pelelangan yang menyebabkan gagal salur dan menunggu beberapa bidang yang memenuhi persyaratan penyaluran tahap II.

### 3. Pengelolaan BLU

Satker yang menerapkan PPK BLU di wilayah Bengkulu ada 4 satker, yaitu Bandar Udara Fatmawati, Universitas Bengkulu, Politeknik Kesehatan Bengkulu dan RS Bhayangkara Bengkulu. Total pagu BLU dari keempat satker tersebut adalah sebesar Rp300,75 miliar. Realisasi anggaran sumber dana BLU sampai dengan akhir Triwulan III tahun 2018 adalah sebesar Rp118,69 miliar. Rincian Pagu dan Realisasi anggaran sumber dana BLU pada masing-masing Satker BLU sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Pagu dan Realisasi Anggaran sumber dana BLU pada Satker BLU  
Lingkup Provinsi Bengkulu s.d akhir Triwulan III Tahun 2018 (dalam miliar Rp)**



Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

Sedangkan total pagu belanja pada seluruh Satker BLU Lingkup Provinsi Bengkulu sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2018 yang bersumber dari Rupiah Murni dan PNBPN adalah sebesar Rp624,06 miliar, dengan realisasi belanja sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2018 adalah sebesar Rp291,9 miliar. Berdasarkan persentase realisasi, Satker RS Bhayangkara Bengkulu dan Universitas Bengkulu telah mencapai lebih dari 50 persen yaitu masing-masing 53,94 persen dan 51,07 persen. Sedangkan realisasi belanja satker Bandar Udara Fatmawati merupakan yang terkecil yaitu sebesar Rp43,6 miliar (31,20 persen).

#### 4. Manajemen Investasi Pusat

Data Penyaluran KUR sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2018 per Bank/Penyalur lingkup Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

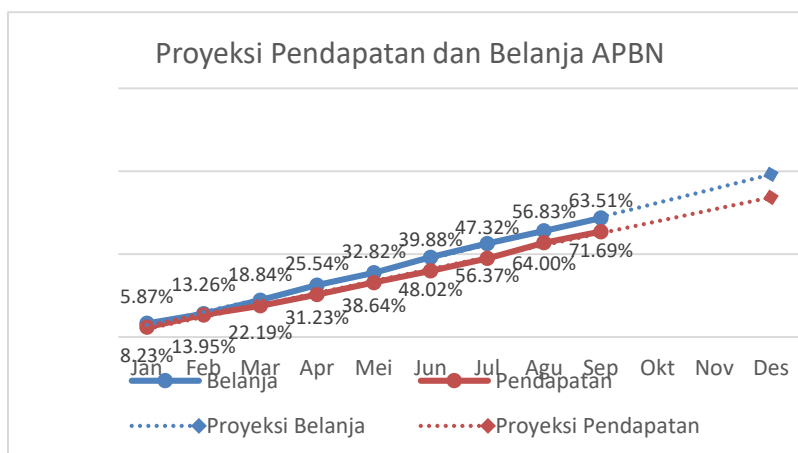
**Penyaluran KUR per Bank/Penyalur Lingkup Provinsi Bengkulu  
s.d akhir Triwulan III Tahun 2018 (dalam juta Rp)**

| No                      | Bank/Penyalur              | Jumlah Debitur | Nilai Penyaluran (dalam juta rupiah) |
|-------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1                       | Bank Rakyat Indonesia      | 26.177         | 605.827,38                           |
| 2                       | Bank Mandiri               | 3.137          | 264.743,16                           |
| 3                       | Bank Negara Indonesia 1946 | 209            | 52.890,00                            |
| 4                       | BPD Bengkulu               | 120            | 18.552,00                            |
| 5                       | Bank Tabungan Negara       | 4              | 920,00                               |
| 6                       | BRI Syariah                | 465            | 13.993,50                            |
| 7                       | CTBC Bank                  | 9              | 157,43                               |
| 8                       | SIKP UMi                   | 126            | 741,00                               |
| <b>Total Penyaluran</b> |                            | <b>30.247</b>  | <b>957.824,46</b>                    |

Sumber: Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), data diolah

Sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2018, KUR yang telah tersalur di Provinsi Bengkulu adalah sebesar Rp957,82 miliar rupiah, yang disalurkan kepada 30.247 debitur. Sebagian besar disalurkan oleh Bank BRI Cabang Bengkulu yang menyalurkan sebesar Rp527,06 miliar kepada 25.811 debitur. KUR yang disalurkan lewat Bank BRI sebagian besar merupakan KUR Mikro. Sedangkan Bank BNI 1946 dan Bank Mandiri lebih menysasar pada penyaluran KUR Ritel. Penyaluran UMi di Provinsi Bengkulu juga mulai teralisasi yang disalurkan melalui Pegadaian. Realisasi UMi pada akhir Triwulan III Tahun 2018 adalah sebesar Rp741,00 juta yang diberikan kepada 126 debitur.

### C. Prognosis Realisasi APBN



Perkiraan realisasi pendapatan negara dan belanja negara sampai dengan akhir tahun 2018 dalam lingkup Provinsi Bengkulu yang diproyeksi menggunakan trend

line dengan mempertimbangkan pola realisasi bulan-bulan sebelumnya. Pendapatan Negara diproyeksi akan mencapai Rp2.236,08 miliar atau 96,56 persen dari pagu. Pendapatan Negara tersebut akan berasal dari pendapatan perpajakan diproyeksi akan mencapai 92,35 persen sementara PNBPN akan mencapai 126,56%.

#### Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Bengkulu s.d. Triwulan IV Tahun 2018

(dalam miliar Rp)

| Uraian            | Pagu       | Realisasi s.d TW III |            | Perkiraan Realisasi s.d TW IV |            |
|-------------------|------------|----------------------|------------|-------------------------------|------------|
|                   |            | Rp                   | % thd Pagu | Rp                            | % thd Pagu |
| Pendapatan Negara | 2,315.74   | 1,470.76             | 63.51%     | 2,236.08                      | 96.56%     |
| Belanja Negara    | 14,409.68  | 10,329.93            | 71.69%     | 13,506.19                     | 93.73%     |
| Surplus/(defisit) | -12,093.94 | -8,859.18            |            | -11,270.11                    |            |

Belanja Negara diproyeksi akan mencapai Rp13.506,19 miliar atau 93,73% dari pagu. Belanja Negara disumbangkan oleh belanja pemerintah pusat yang di proyeksikan akan mencapai 91,25 persen dan transfer ke daerah yang mencapai 95,46 persen.

### III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Wilayah Bengkulu terdiri atas sebelas Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agregat seluruh Pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota) dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel Realisasi APBD Lingkup Provinsi Bengkulu s.d. Akhir Triwulan III Tahun 2017 dan Tahun 2018**

(dalam miliar Rp)

| Uraian   | 2017             |                 | 2018             |                 |
|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|  | Pagu             | Realisasi       | pagu             | Realisasi       |
| <b>Pendapatan</b>                                      | <b>12.087,27</b> | <b>8.563,11</b> | <b>11.897,44</b> | <b>8.287,33</b> |
| PAD  | 1.513,37         | 933,07          | 1.745,44         | 863,39          |
| Pendapatan Pajak Daerah                                | 752,67           | 508,58          | 867,92           | 523,55          |
| Pendapatan Retribusi                                   | 47,45            | 31,93           | 59,55            | 20,31           |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah                      | 45,83            | 44,20           | 58,13            | 34,57           |
| Lain-Lain PAD yang sah                                 | 667,43           | 348,36          | 759,84           | 284,95          |
| Pendapatan Transfer                                    | 10.397,99        | 7.597,54        | 9.963,08         | 7.345,26        |
| Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan           | 9.147,21         | 6.770,96        | 8.783,24         | 6.674,04        |
| Dana Bagi Hasil Pajak                                  | 310,48           | 240,62          | 708,16           | 501,53          |
| Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)                      | -                | -               | -                | -               |
| Dana Alokasi Umum                                      | 6.509,81         | 5.310,49        | 6.612,54         | 5.260,13        |
| Dana Alokasi Khusus                                    | 2.326,93         | 1.219,86        | 1.462,53         | 912,38          |
| Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya                    | 986,59           | 686,55          | 852,43           | 521,29          |
| Dana Otonomi Khusus                                    | -                | -               | -                | -               |
| Dana Penyesuaian                                       | 986,59           | 686,55          | 852,43           | 521,29          |
| Transfer Pemerintah Provinsi                           | 254,20           | 140,03          | 324,33           | 149,93          |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak                            | 254,20           | 140,03          | 324,33           | 149,93          |
| Pendapatan Bagi Hasil Lainnya                          | -                | -               | -                | -               |
| Transfer Bantuan Keuangan                              | 10,00            | -               | 3,08             | -               |
| Bantuan Keuangan dari Pemerintah Prov/Kab/Kota Lainnya | 10,00            | -               | 3,08             | -               |
| Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah                   | 175,90           | 32,50           | 188,92           | 78,69           |
| Pendapatan Hibah                                       | 21,00            | 31,98           | 55,94            | 0,18            |
| Pendapatan Dana Darurat                                | -                | -               | -                | -               |
| pendapatan Lainnya                                     | 154,90           | 0,51            | 132,98           | 78,51           |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>                               | <b>12.087,27</b> | <b>8.563,11</b> | <b>11.897,44</b> | <b>8.287,33</b> |
| <b>Belanja</b>   | <b>11.132,10</b> | <b>5.534,70</b> | <b>10.850,95</b> | <b>5.573,23</b> |
| Belanja Pegawai  | 4.989,90         | 3.315,55        | 5.149,22         | 3.319,71        |
| Belanja Barang   | 2.845,78         | 1.110,95        | 2.984,22         | 1.170,32        |
| Belanja Bunga  | -                | -               | -                | -               |
| Belanja Subsidi  | 0,49             | 0,18            | 0,20             | -               |
| Belanja Hibah  | 372,00           | 263,95          | 437,01           | 311,81          |
| Belanja Sosial   | 12,36            | 3,06            | 13,16            | 6,49            |
| Belanja Bantuan Keuangan                               | -                | -               | -                | -               |
| Belanja Modal  | 2.869,77         | 840,95          | 2.251,81         | 764,85          |
| Belanja Tak Terduga                                    | 41,79            | 0,05            | 15,33            | 0,04            |
| Transfer Pemerintah Daerah                             | 1.875,10         | 1.138,36        | 1.678,92         | 890,99          |
| Transfer/Bagi Hasil ke Desa                            | 334,71           | 256,68          | 279,79           | 123,12          |
| Transfer bagi Hasil Pajak Daerah                       | 334,71           | 256,68          | 279,79           | 123,12          |
| Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya                 | -                | -               | -                | -               |
| Transfer bantuan Keuangan                              | 1.540,39         | 881,68          | 1.399,13         | 767,86          |
| Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda lainnya             | -                | -               | -                | -               |
| Transfer bantuan Keuangan ke Desa                      | 1.539,74         | 881,03          | 1.398,48         | 767,21          |
| Transfer Bantuan Keuangan Lainnya                      | 0,65             | 0,65            | 0,65             | 0,65            |
| <b>Jumlah Belanja dan Transfer</b>                     | <b>13.007,20</b> | <b>6.673,06</b> | <b>12.529,86</b> | <b>6.464,21</b> |
| <b>Surplus/Defisit</b>                                 | <b>(919,93)</b>  | <b>1.890,05</b> | <b>(632,43)</b>  | <b>1.823,12</b> |

Sumber: SIKD (diolah)

Capaian Pendapatan secara agregat sampai dengan akhir triwulan III tahun 2018 mencapai Rp8,29 triliun, mengalami penurunan 3,22% dari triwulan III 2017 yang sebesar Rp8,56 triliun. Penurunan realisasi pendapatan ini dipengaruhi oleh semua jenis pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar 7,47%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah turun 36,38%, Pendapatan transfer turun 3,32%, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah mengalami penurunan 18,20%.

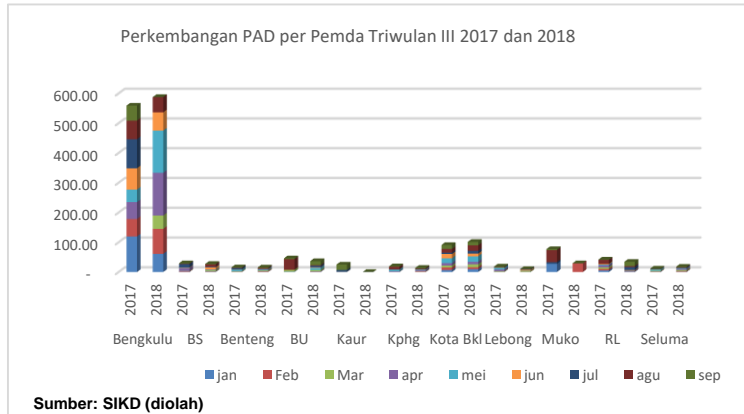
Capaian Belanja dan Transfer secara agregat sampai dengan akhir triwulan III tahun 2018 sebesar Rp6,46 triliun juga mengalami penurunan sebesar 3,13% dari triwulan III



2017 yang sebesar Rp6,67 triliun. Kenaikan realisasi belanja dan transfer ini dipengaruhi oleh Belanja Daerah yang meningkat 0,70% dan Transfer Pemerintah Daerah yang mengalami penurunan sebesar 21,73%.

## A. Pendapatan Daerah

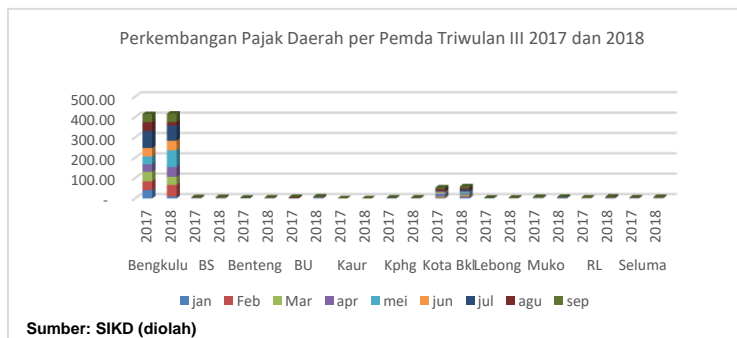
### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Secara agregat PAD Pemda lingkup Bengkulu sampai dengan akhir triwulan III tahun 2018 sebesar Rp863,39 miliar atau 49,47% dari pagu. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar 7,47% dari triwulan III 2017.

Realisasi PAD dipengaruhi oleh pendapatan pajak daerah yang mampu tumbuh 2,94%. Sedangkan retribusi daerah mengalami penurunan 36,38%, Hasil Kakayaan Daerah yang dipisahkan juga mengalami penurunan 21,79% dan lain-lain pendapatan yang sah juga mengalami penurunan 18,20%.

#### a. Penerimaan Pajak Daerah



Agregat pajak daerah seluruh pemda di Bengkulu sampai dengan akhir triwulan III tahun 2018 sebesar Rp523,55 miliar atau 60,32% dari pagu, tumbuh 2,94% apabila

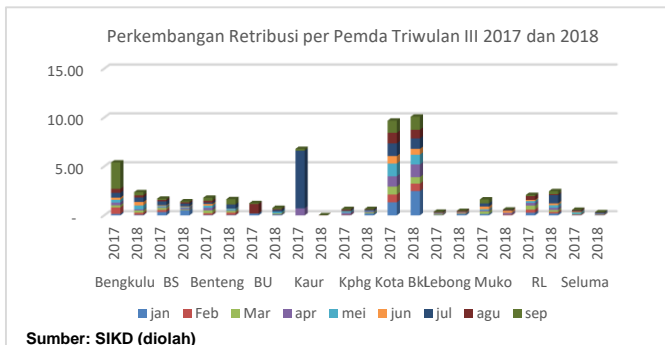
dibandingkan dengan triwulan III 2017. Peningkatan pajak daerah ini disumbangkan oleh 10 Pemda yang mengalami kenaikan, dan satu Pemda yaitu kota Pemda Kaur yang mengalami penurunan.

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran menjadi sumber pendapatan pada triwulan III tahun 2018. Meningkatnya realisasi pajak penerangan jalan ini mengindikasikan semakin baiknya tingkat ketepatan waktu pembayaran tagihan PLN oleh masyarakat, dimana PPJ ini dipungut sebesar 10% dari konsumsi listrik masyarakat. Kenaikan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran

disebabkan adanya beberapa acara tingkat nasional dan event pariwisata budaya yang diselenggarakan di wilayah Bengkulu yaitu festival bumi rafflesia 2018, pekan olah raga provinsi, kompetisi sains madrasah 2018 dan festival tabut 2018.

**b. Penerimaan Retribusi Daerah**

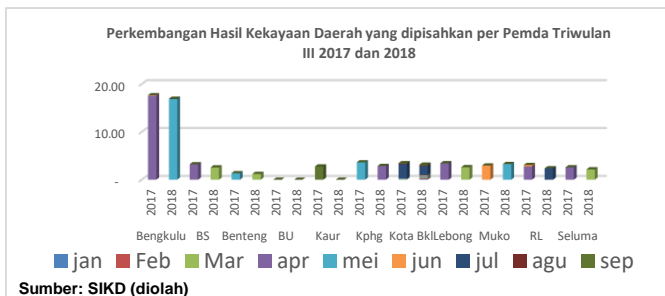
Agregat penerimaan retribusi seluruh pemda di Bengkulu sampai dengan akhir triwulan III 2018 sebesar Rp20,31 miliar atau 34,11% dari pagu, mengalami penurunan 36,38% apabila dibandingkan dengan triwulan III 2017. Retribusi daerah ini dipengaruhi oleh 3 Pemda yang mengalami kenaikan dan 8 Pemda yang mengalami penurunan.



Secara agregat, retribusi jasa umum (Retribusi sewa tanah dan bangunan, dan retribusi rekreasi) menjadi penyumbang penurunan pada triwulan III tahun 2018. Khusus Kabupaten Kaur Retribusi pada triwulan III 2018 mengalami

penurunan sampai 99%, hal ini disebabkan karena retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu yang mengalami penurunan signifikan.

**c. Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

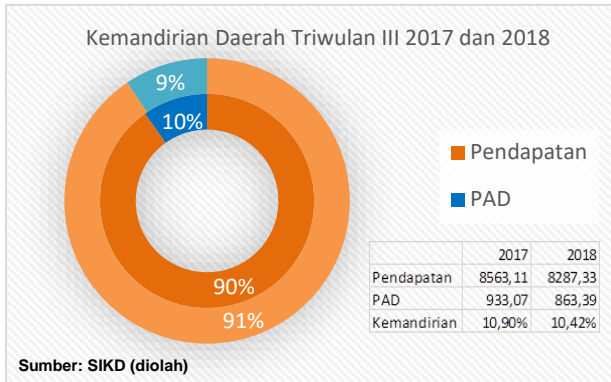


Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan seluruh pemda di Bengkulu sampai dengan akhir triwulan III tahun 2018 sebesar Rp34,57 miliar atau 59,47% dari pagu, mengalami penurunan

21,79% dari triwulan III 2017.

Penurunan kinerja ini dikontribusi paling besar oleh Pemda Bengkulu Tengah, dimana sepanjang 2018 baru merealisasikan satu-satunya sumber pendapatan dari kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Bengkulu pada bulan Maret 2018. Periode setelah itu tidak menunjukkan ada penerimaan lainnya.

Meskipun secara agregat mengalami penurunan, Pemda Mukomuko mencatat pertumbuhan positif sebesar 9,97% untuk sumber dan jenis pendapatan yang sama yaitu Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Bengkulu pada bulan Mei 2018 sebesar Rp3,27 miliar.

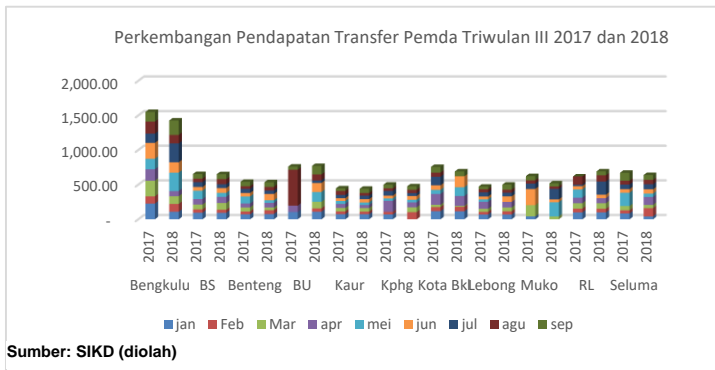


Kemandirian fiskal tercermin dari perbandingan antara PAD dengan total pendapatan. Perbandingan PAD dan Total Pendapatan Pemda di Bengkulu pada Triwulan III Tahun 2018 sebesar 10,42% atau turun dari triwulan III 2017 yang sebesar 10,90%.

Rendahnya PAD dikarenakan Pemda di Bengkulu belum sepenuhnya menggali secara maksimal sumber-sumber PAD-nya. Kekayaan yang melimpah di Bengkulu tidak menjamin PAD yang diterima menjadi lebih baik. Infrastruktur yang masih kurang dan perizinan diduga menjadi salah satu penyebab investor tidak mau menanamkan modalnya di Bengkulu.

## 2. Pendapatan Transfer

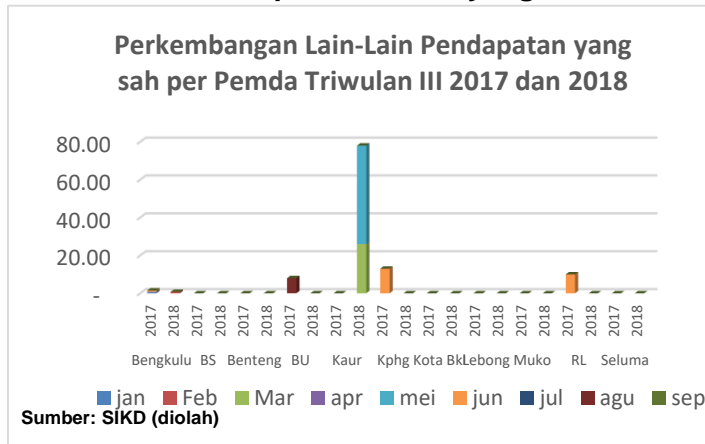
Total pendapatan transfer pada pemda lingkup Provinsi Bengkulu sampai dengan akhir triwulan III tahun 2018 sebesar Rp7,34 triliun atau 73,72% mengalami penurunan 3,32% dari Triwulan III 2017. Pendapatan transfer disumbangkan oleh Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar Rp6,67 triliun, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp521,29 miliar, dan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp149,93 miliar.



Apabila dilihat dari 11 (sebelas) Pemerintah Daerah, hanya terdapat 3 Pemda mengalami peningkatan dan 8 Pemda lainnya mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Triwulan III 2017. Sebanyak 8 Pemda yang

mengalami penurunan dikarenakan Pagu DAK FISIK yang turun signifikan dan belum disalurkan karena DAK Fisik Tahap II serta adanya penundaan DAU karena pemda belum menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran pada SIKD.

### 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah



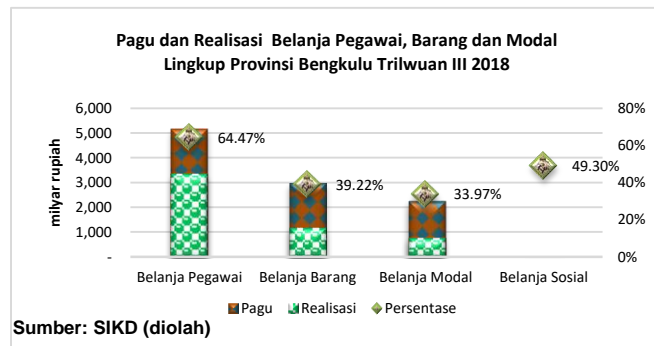
Secara agregat, realisasi lain-lain pendapatan yang sah pada pemda lingkup Provinsi Bengkulu sampai dengan akhir triwulan III 2018 sebesar Rp78,69 miliar atau mengalami peningkatan signifikan sebesar 142,14% dibandingkan triwulan III 2017 sebesar

Rp32,5 miliar. Peningkatan ini merupakan akibat dari meningkatnya pendapatan jasa giro dan denda pajak, khususnya pada Kabupaten Kaur.

### B. Belanja Daerah

#### 1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

Realisasi Belanja pegawai pada pemda lingkup Provinsi Bengkulu sampai dengan akhir triwulan III tahun 2018 sebesar Rp3,32 triliun atau 64,47% dari pagu. Realisasi ini meningkat 0,13% dari triwulan III 2017. Realisasi Belanja Barang sebesar Rp1,17 triliun atau 39,22%



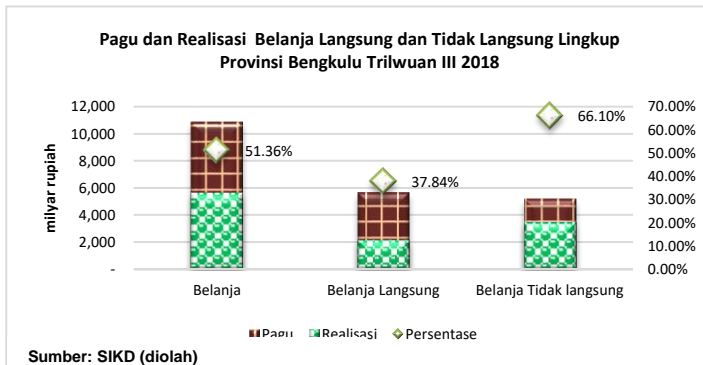
dari pagu. Realisasi ini meningkat 5,34% dari triwulan III 2017. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp864,85 miliar atau 33,97% dari pagu atau turun 9.05% dari triwulan III 2017.

Meningkatnya Belanja Pegawai disumbang oleh pembayaran THR dan Gaji ke-13 pada bulan Juni dan Juli 2018. Meningkatnya Belanja Barang dikarenakan dampak dari persiapan pelaksanaan pilkada serentak yang dilaksanakan pada bulan Juli dan Pemilihan Walikota Bengkulu Tahun 2018. Sementara itu, turunnya Belanja Modal dipengaruhi oleh turunnya pagu DAK Fisik secara signifikan serta proses pengadaan barang dan jasa yang lambat direalisasikan dikarenakan banyaknya pejabat PPK yang takut tersangkut masalah hukum dalam melaksanakan pekerjaan lelang.

Terkait dengan belanja daerah dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses pengadaan barang dan jasa agar dipercepat dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar proses pengadaan tidak keluar dari koridor hukum.
2. Melakukan koordinasi dengan LKPP terkait dengan pengadaan e-katalog untuk memudahkan proses pengadaan dan memberikan rasa aman bagi pejabat pengadaan.

## 2. Belanja Langsung dan Tidak Langsung

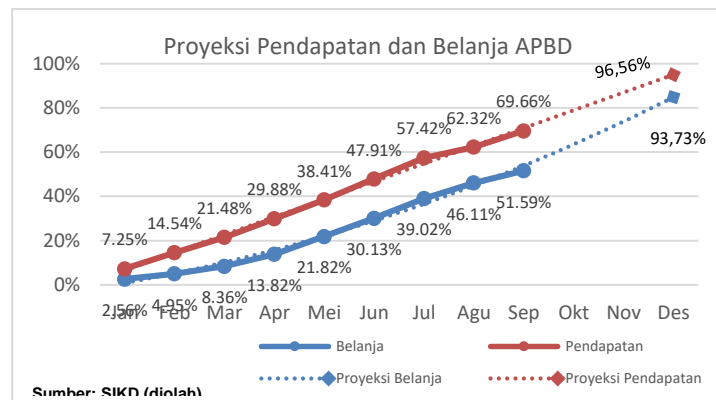


Realisasi total Belanja pemda lingkup Provinsi Bengkulu sampai dengan akhir triwulan III tahun 2018 sebesar Rp5,57 triliun atau 51,36% dari pagu. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp2,14 triliun atau 37,84% dari pagu dan Belanja tidak

langsung sebesar Rp3,43 triliun atau 66,10% dari pagu. Dengan melihat realisasi tersebut, belanja tidak langsung lebih dominan daripada belanja langsung. Dominannya belanja tidak langsung disebabkan karena belanja digunakan untuk pembayaran gaji dan operasional kantor. Sedangkan realisasi belanja langsung masih rendah karena masih dalam proses pengadaan terutama untuk belanja modal.

### C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2018

Secara agregat, realisasi pendapatan APBD seluruh pemda di Provinsi Bengkulu sampai dengan akhir 2018 diperkirakan sebesar Rp11.488,17 miliar atau 96,56% dari target. Hal-hal yang diperkirakan tidak mencapai target adalah PAD dan dana transfer.



Tabel Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Bengkulu Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2018

| Uraian            | Pagu      | Realisasi s.d TW III |            | Perkiraan Realisasi s.d TW IV |            |
|-------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------------|------------|
|                   |           | Rp                   | % thd Pagu | Rp                            | % thd Pagu |
| Pendapatan Daerah | 11,897.44 | 8,287.33             | 69.66%     | 11,488.17                     | 96.56%     |
| Belanja Daerah    | 12,529.86 | 6,464.21             | 51.59%     | 11,744.24                     | 93.73%     |
| Surplus/(defisit) |           | -632.43              | 1,823.12   | -256.08                       |            |

Realisasi Belanja APBD agregat provinsi Bengkulu sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp13.925,56 miliar atau 92,94% dari pagu. Penghematan alamiah dari sisa kontrak dan permasalahan pengadaan barang dan jasa menyebabkan belanja modal tidak akan terealisasi maksimal. Dari perkiraan pendapatan dan belanja tersebut, maka diproyeksikan pada akhir tahun 2018 akan terjadi defisit sebesar Rp256,08 miliar.

## IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

### A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Pendapatan Pemerintah Konsolidasian Provinsi Bengkulu Triwulan III 2018 sebesar Rp2.262,39,08 miliar meningkat 1,12% dibandingkan dengan triwulan III 2017 sebesar Rp2.237,27 miliar, sementara Belanja Pemerintah Konsolidasian Provinsi Bengkulu Triwulan III sebesar Rp9.262,03 miliar meningkat 0,50% dibandingkan dengan triwulan III tahun 2017 sebesar Rp9.215,62 miliar. Meningkatnya pendapatan pemerintah konsolidasian dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan perpajakan mampu tumbuh sebesar 6,38% dan pendapatan bukan pajak mampu tumbuh sebesar 3,29%. Sedangkan Meningkatnya Belanja Konsolidasian dipengaruhi oleh meningkatnya Belanja Pemerintah sebesar 3,64% sementara belanja transfer yang mengalami penurunan sebesar 21,73%.

**Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian  
Tingkat Wilayah Provinsi Bengkulu s.d. Triwulan III Tahun 2018  
(dalam miliar Rupiah)**

| Uraian   | 2018              |                 |                   | Kenaikan/<br>Penurunan | 2017              |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|  | Pusat             | Daerah          | Konsolidasi       |                        |                   |
| <b>Pendapatan Negara</b>                       | <b>1,470.76</b>   | <b>8,287.33</b> | <b>2,262.39</b>   | <b>1.12%</b>           | <b>2,237.27</b>   |
| Pendapatan Perpajakan                          | 1,183.45          | 523.55          | 1,707.00          | 6.38%                  | 1,604.68          |
| Pendapatan Bukan Pajak                         | 287.30            | 418.35          | 705.65            | 3.29%                  | 683.16            |
| Hibah  | -                 | 0.18            | 0.18              | -99.44%                | 31.98             |
| Transfer                                       | -                 | 7,345.26        | (150.44)          | 82.23%                 | (82.56)           |
| <b>Belanja Negara</b>                          | <b>10,293.52</b>  | <b>6,464.21</b> | <b>9,262.03</b>   | <b>0.50%</b>           | <b>9,215.62</b>   |
| Belanja Pemerintah                             | 2,797.82          | 5,573.23        | 8,371.05          | 3.64%                  | 8,077.26          |
| Transfer                                       | 7,495.70          | 890.99          | 890.99            | -21.73%                | 1,138.36          |
| <b>Surplus/(defisit)</b>                       | <b>(8,822.76)</b> | <b>1,823.12</b> | <b>(6,999.64)</b> | <b>0.31%</b>           | <b>(6,978.35)</b> |
| <b>Pembiayaan</b>                              |                   | <b>24.53</b>    | <b>24.53</b>      | <b>-453.82%</b>        | <b>(6.93)</b>     |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah                   |                   | 50.80           | 50.80             | 466.02%                | 8.97              |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah                  |                   | 26.26           | 26.26             | 65.11%                 | 15.91             |
| <b>Sisa Lebih (kurang) pembiayaan anggaran</b> | <b>(8,822.76)</b> | <b>1,847.65</b> | <b>(6,975.11)</b> | <b>-0.15%</b>          | <b>(6,985.28)</b> |

Sumber: LKPK Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu

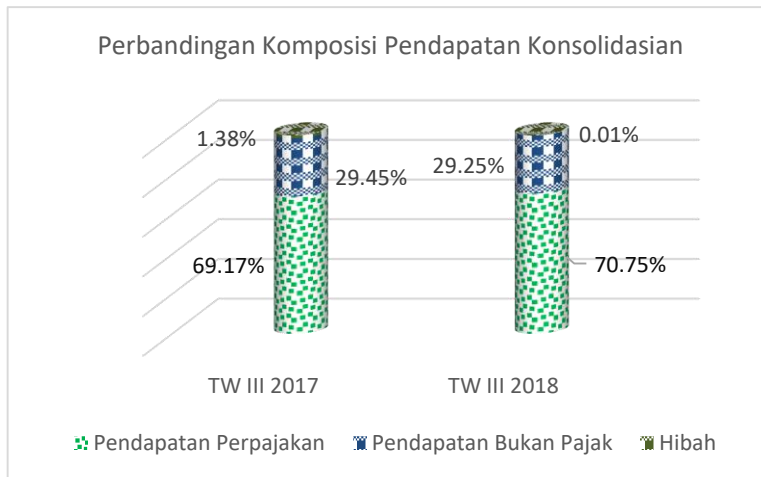
Catatan: Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah untuk triwulan III 2018 sebesar Rp7.495,70 miliar

### B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

#### 1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Dalam Pembentukan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian, Porsi Pendapatan Perpajakan mengalami kenaikan sebesar 1,57% dari 69,17% pada triwulan III 2017

menjadi 70,75% pada triwulan III 2018. Ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan pajak yang lebih besar dari jenis pendapatan yang lainnya.

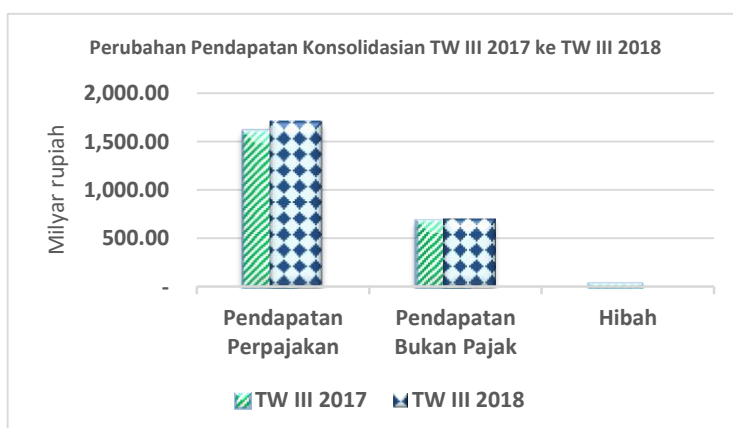


Sementara Porsi pendapatan bukan pajak mengalami penurunan sebesar 0,20% dari 29,45% pada triwulan III 2017 menjadi 29,25% pada triwulan III 2018. Penurunan porsi ini dikarenakan meningkatnya PNBP yang

lebih lebih rendah dari meningkatnya pendapatan pajak. Sementara untuk Porsi Hibah mengalami penurunan sebesar 1,37% dari 1,38% pada triwulan III 2017 menjadi 0,01% pada triwulan III 2018, hal ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan hibah pada yang mencapai 99,44%.

Porsi Pendapatan Perpajakan yang semakin besar mengindikasikan bahwa pendapatan Pemerintah Konsolidasian di Provinsi Bengkulu semakin membaik karena perpajakan merupakan sumber utama dari pendapatan. Diharapkan dengan naiknya porsi pendapatan perpajakan ini mampu meningkatkan kemandirian fiskal di Provinsi Bengkulu.

## 2. Analisis Perubahan



Pendapatan perpajakan pada triwulan III tahun 2018 tumbuh 6,38% dibandingkan dengan triwulan III tahun 2017. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan pajak pusat yaitu tumbuhnya PPh sebesar 16,26% dan PPN tumbuh 0,89%. Sedangkan

Pendapatan Bukan Pajak konsolidasian tumbuh 3,29% dipengaruhi oleh tumbuhnya PNBP pusat yang mencapai 11,29%. Tumbuhnya pendapatan perpajakan yang paling tinggi mengindikasikan pendapatan di Bengkulu semakin baik.

### 3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap kenaikan realisasi pendapatan konsolidasian

Menurut BPS Provinsi Bengkulu porsi Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB di Provinsi Bengkulu berkisar antara 19% – 20%. Dari data tersebut dapat diambil hipotesis bahwa kenaikan/penurunan pendapatan akan berbanding lurus kenaikan/penurunan pertumbuhan ekonomi.

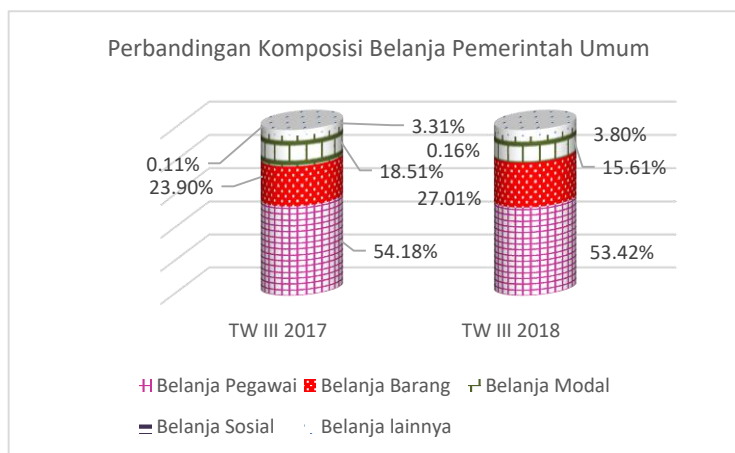
| Uraian                | Realisasi TW III 2017 | Realisasi TW III 2018 | Kenaikan |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Penerimaan Perpajakan | 1,604.68              | 1,707.00              | 6.38%    |
| PNBP                  | 683.16                | 705.65                | 3.29%    |
| Total                 | 2,287.85              | 2,412.66              | 5.46%    |
| PDRB/Pert Ekonomi     | 15,316.41             | 16,790.47             | 4.98%    |

Pada triwulan III 2018 Pertumbuhan Ekonomi di Bengkulu sebesar 4,98%. Pertumbuhan ini salah satunya disumbangkan oleh Konsumsi pemerintah yang mampu tumbuh 5,85%. Dari laporan konsolidasian diketahui bahwa penerimaan perpajakan mampu tumbuh 6,38% dan PNBP mampu tumbuh 3,29%. Berdasarkan hal tersebut, potensi PNBP untuk ditingkatkan masih ada terutama melalui PNBP Sumber Daya Alam khususnya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang telah memberikan andil pertumbuhan sebesar 3,21%.

### C. BELANJA KONSOLIDASIAN

#### 1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Pada Triwulan III 2018 porsi belanja pegawai sebesar 53,42% mengalami penurunan sebesar 0,76% apabila dibandingkan dengan triwulan III 2017 yang sebesar 54,18%. Sementara porsi belanja barang meningkat 3,11% dari 23,90% menjadi 27,01%, sementara porsi Belanja modal mengalami penurunan sebesar 2,90% dari 18,51% menjadi 15,61%.



Penurunan porsi belanja pegawai disebabkan oleh kenaikan belanja pegawai sebesar 2,22% lebih rendah dari kenaikan belanja barang. sedangkan naiknya porsi belanja barang disebabkan oleh kenaikan belanja barang yang



signifikan yaitu mencapai 17,17%. Sementara porsi belanja modal menurun disebabkan oleh penurunan belanja modal yang mencapai 12,54%.

## 2. Analisis Perubahan



Belanja Pemerintah Konsolidasian secara agregat pada triwulan III 2018 meningkat 3,64% apabila dibandingkan dengan triwulan III 2017. Kenaikan tersebut disumbangkan oleh Belanja pegawai yang mengalami kenaikan 2,22%, belanja

barang mengalami kenaikan 17,17% dan belanja bantuan sosial mengalami kenaikan 59,67%, dan belanja modal mengalami penurunan 12,54%. Kenaikan Belanja pegawai dan barang mengindikasikan belanja operasional masih mendominasi di Provinsi Bengkulu. Kenaikan Belanja pegawai disebabkan oleh pembayaran gaji ketigabelas yang juga mencakup tunjangan kinerja. Naiknya Belanja barang disebabkan oleh persiapan pilkada serentak yang akan berlangsung pada tahun 2019. Belanja modal mengalami penurunan disebabkan oleh pagu DAK Fisik pada tahun 2018 yang mengalami penurunan signifikan yaitu mencapai 25,37% dibandingkan tahun 2017.

## 3. Analisis dampak kebijakan fiskal kepada indikator ekonomi regional

Rasio Belanja Konsolidasian terhadap jumlah penduduk pada triwulan III 2018 sebesar Rp2,83 juta lebih rendah dari triwulan III 2017 sebesar Rp2,86 juta. Semakin menurunnya rasio ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk di Bengkulu belum lebih cepat dari peningkatan belanja pemerintah. Hal ini disebabkan oleh Belanja Modal Pemerintah Daerah yang turun akibat pagu DAK Fisik turun signifikan. Atas hal tersebut Pemerintah daerah harus meningkatkan sumber pembiayaan terutama melalui PAD dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.

|                          | TW II 2017        | TW II 2018        |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Belanja Konsolidasian    | 5.534.697.220.574 | 5.573.227.234.733 |
| Jumlah Penduduk Bengkulu | 1.934.300         | 1.963.300         |
| Rasio                    | 2.861.343         | 2.838.703         |

#### D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Dari data laporan operasional, dapat dianalisis kontribusi pemerintah dalam PDRB.

|   | TW III 2018 | PDRB s.d tw III | % atas PDRB |
|---|-------------|-----------------|-------------|
| Revenue                                 | 11.342,48   | 49.053,25       | 23,12%      |
| Expenses                                | 11.888,69   |                 | 24,23%      |
| Gross operating balance                 | (546,21)    |                 | -1,11%      |
| Net acquisition of non financial assets | 48,39       |                 | 0,09%       |
| Net lending/borrowing                   | (587,12)    |                 | -1,19%      |

*Net lending/borrowing* terhadap PDRB Provinsi Bengkulu sebesar -1,19%, Artinya pendapatan yang diterima di Bengkulu pada triwulan III 2018 belum mampu membiayai seluruh belanja. Hal ini dipengaruhi oleh penerimaan perpajakan dan pendapatan bukan pajak pusat yang belum mampu menutup belanja, sementara pendapatan daerah masih tergantung dengan dana transfer pemerintah pusat. Ini mengindikasikan perekonomian di Bengkulu sangat dipengaruhi oleh dana transfer dari pemerintah pusat.

Apabila dianalisis lebih lanjut dengan rumus perbandingan dengan PDRB maka kontribusi Pemerintah secara spesifik dapat disajikan sebagai berikut:

##### 1. Kontribusi belanja Pemerintah terhadap PDRB

Kontribusi pemerintah dalam PDRB di Provinsi Bengkulu sebesar 23,12% menunjukkan bahwa APBN dan APBD di provinsi Bengkulu menjadi stimulus fiskal yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk itu percepatan realisasi APBN dan APBD yang proposional diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

##### 2. Kontribusi investasi Pemerintah terhadap PDRB adalah

Perbandingan *net acquisition of financial asset* dibagi dengan PDRB di Provinsi Bengkulu sebesar 0,09%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah pada triwulan III 2018 berkontribusi 0,09% terhadap PDRB. Rendahnya kontribusi belanja modal terhadap PDRB dikarenakan pada triwulan III 2018 belanja modal masih rendah yang dikarenakan masih berlangsungnya proses pengadaan barang dan jasa.

## V. BERITA/ISU FIKAL REGIONAL TERPILIH

### Peran Dana Desa Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu.



Dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadi prioritas penting bagi Pemerintahan Jokowi-JK dimana desa diposisikan sebagai kekuatan besar membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa , dalam bentuk Program Nawacita, dalam Tahun Anggaran 2018 ini Pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp. **946.39** Miliar, untuk 1.341 Desa di 9 (sembilan) Pemerintah daerah. yang penyalurannya melalui 4 (empat) KPPN.

Data BPS Bengkulu menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu Pada bulan Maret 2018 mencapai 301.814 orang (15,43 persen), turun 15.173 orang dibandingkan dengan Maret 2017 sebesar 316.977 orang (16,45 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 16,33 persen turun menjadi 15,25 persen pada Maret 2018. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 16,51 persen turun menjadi 15,52 persen pada Maret 2018.

Beberapa indikator yang dapat dijadikan tolak ukur adalah masih banyak wilayah belum tersentuh listrik, jalur produksi belum baik dan tingkat penghasilan yang masih rendah. Disamping itu banyaknya uang yang beredar dan yang dibelanjakan ke luar daerah, yang disebabkan oleh sektor industri Bengkulu yang belum memadai sehingga sektor usaha di Bengkulu sangat berketergantungan dengan daerah luar.

#### **Strategi dalam memaksimalkan penggunaan Dana Desa dalam pengentasan kemiskinan di Desa Bani.**

Berbagai prestasi telah ditorehkan oleh Desa Bani, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Salah satu paling membanggakan adalah keberhasilan desa ini menduduki peringkat ke-6 dari 100 desa di seluruh Indonesia dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Desa Bani berhasil mendapatkan skor 0,937 dan masuk ke dalam kategori Desa Mandiri. Salah satu faktor yang menjadi kunci keberhasilannya adalah kesuksesan program pengentasan angka kemiskinan warga desa. Dari tahun ke tahun sejak 2015

angka kemiskinan di Desa Kota Bani selalu mengalami penurunan, Tercatat pada 2015 lalu warga prasejahtera di desa ini mencapai 120 kepala keluarga. Selanjutnya, berturut-turut angka itu berkurang menjadi 105 kepala keluarga pada 2016, 81 kepala keluarga pada 2017, dan terakhir menjadi hanya 63 kepala keluarga pada 2018. Terpenuhinya pelayanan dasar Salah satu faktor penting dalam keberhasilan Desa Kota Bani menurunkan angka kemiskinan adalah terpenuhinya pelayanan dasar warga desa. Tiga bentuk pelayanan dasar publik di desa itu meliputi barang publik, jasa publik, dan layanan administratif. Dan ketiga hal tersebut harus didasarkan pada prinsip terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan melibatkan masyarakat.



Workshop Dana Desa di Bengkulu Utara

Pemanfaatan dana desa dari tahun ke tahun di Desa Bani sangat berperan dalam mengentaskan kemiskinan. Desa ini sudah mendapatkan aliran dana desa dari pemerintah pusat sejak 2015. Pada tahun pertama desa ini mendapatkan kucuran dana Rp

291,9 juta. Dana tersebut digunakan oleh untuk membangun gorong-gorong sebagai aliran air sanitasi dan membangun jalan rabat beton. Kemudian, pada 2016, desa ini mendapatkan dana sebanyak Rp 639,2 juta. Dana itu dipakai untuk memelihara sarana dan prasarana desa. Pada 2017 desa ini juga mendapatkan bantuan dana desa sebesar Rp 814 juta. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan balai desa, pos keamanan dan lingkungan, pemeliharaan PAUD, pemberdayaan masyarakat dengan penyediaan alat tangkap bagi nelayan, serta membangun jalan rabat beton. Tahun ini Desa Kota Bani kembali mendapatkan dana desa dengan nominal Rp 684,6 juta. Dana tersebut juga dimanfaatkan untuk membangun pelapis tebing, pembangunan saluran pemukiman (50 persen), pembangunan jalan menuju tempat pelelangan ikan (TPI), pembangunan tribun kecil di depan balai desa, dan pembangunan Tugu Gajah

Pemanfaatan dana desa tersebut telah memberikan dampak yang signifikan bagi warga. Salah satunya dengan dengan pembangunan jalan desa. Dahulu, sebelum jalan desa diperbaiki, para petani harus membayar biaya angkut Rp 100 ribu per ton. Namun, sejak jalan desa selesai dibangun, tak ada lagi biaya angkut atau langsir sehingga tidak mengurangi keuntungan panen.



JL. Adam Malik (d.h. Jl. P.Natadirja No. 271) Km. 8, Kota Bengkulu 38225  
Telp. 0736-345237, 343082 Fax. 0736-345311  
Website : [www.djpbk.kemenkeu.go.id/kanwil/bengkulu](http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/kanwil/bengkulu)  
Email : [djpbk.bengkulu@gmail.com](mailto:djpbk.bengkulu@gmail.com)